

ABSTRACT

This study analyzes the digital public debate that arose due to the government's plan to increase the PPN rate to 12%, a fiscal policy that sparked concerns about the economic burden and showed the evolution of opinion formation in the era of social media. The objective of this study is to explain the formation of public opinion on Twitter (X) as a digital public sphere regarding the PPN 12% issue and to analyze its role in the framework of agenda-setting. Using a qualitative method that combines big data using word cloud, sentiment analysis and topic modeling of Twitter (X) tweets with a digital public sphere framework, the findings show that negative sentiment dominates public discourse, reflecting perceptions of fiscal injustice. Twitter (X) proved to function as a participatory arena that successfully raised technocratic issues into public discourse, and digital public opinion played a significant role in pushing the PPN 12% issue onto the national policy agenda, as marked by the government's response. This study recommends that the government improve transparency, education, and public participation mechanisms in fiscal policy formulation, as well as utilize digital public opinion analysis as strategic feedback.

Keywords: *PPN 12%, Agenda-Setting, Digital Public Sphere, Public Opinion, Twitter (X), Sentiment Analysis*

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis perdebatan publik digital yang timbul akibat rencana pemerintah menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12%, kebijakan fiskal yang memicu kekhawatiran beban ekonomi dan menunjukkan evolusi pembentukan opini di era media sosial. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan pembentukan opini publik di Twitter (X) sebagai ruang publik digital terhadap isu PPN 12% dan menganalisis perannya dalam kerangka penetapan agenda (*agenda-setting*). Menggunakan metode kualitatif yang menggabungkan analisis *big data* dengan analisis sentimen, *word cloud*, dan *topic modelling* dari cuitan Twitter (X) dengan kerangka ruang publik digital, temuan menunjukkan bahwa sentimen negatif mendominasi percakapan publik, mencerminkan persepsi ketidakadilan fiskal. Twitter (X) terbukti berfungsi sebagai arena partisipatif yang berhasil mengangkat isu teknokratis menjadi wacana publik, dan opini publik digital memainkan peran signifikan dalam mendorong isu PPN 12% masuk ke dalam agenda kebijakan nasional, yang ditandai dengan respons pemerintah dan perubahan kebijakan. Penelitian ini merekomendasikan pemerintah untuk meningkatkan transparansi, edukasi, dan mekanisme partisipasi publik dalam perumusan kebijakan fiskal, serta memanfaatkan analisis opini publik digital sebagai umpan balik strategis.

Kata Kunci: PPN 12%, Agenda-Setting, Ruang Publik Digital, Opini Publik, Twitter (X), Analisis Sentimen